

**KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG**

Nama : AGUNG SETIAJI

NIP : 198008012003121004

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang pemanfaatan, pengawasan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Fungsi :
 1. Pelaksanaan kegiatan pra survei, survei dan perencanaan teknis struktur jalan dan jembatan;
 2. Pelaksanaan survei harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
 3. Pelaksanaan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
 4. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
 5. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang jalan dan jembatan;
 6. Pelaksanaan pendataan dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta penyusunan legger jalan;
 7. Pelaksanaan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan dan jembatan;
 8. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan penunjang jalan;
 9. Pelaksanaan operasional penunjang pembangunan dan pemeliharaan bidang bina marga;
 10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset pemerintah daerah di bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan; dan
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
----	-----------------------------------	--	------------------	---------------------	----------------	--------	-------------------------

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			75.22	%	<p>• Berdasarkan Permen PUPR No. 13 tahun 2011, persentase batasan kerusakan terhadap luas lapis perkerasan permukaan adalah sebagai berikut: Kondisi Jalan --> Persentase batasan kerusakan terhadap luas lapis perkerasan permukaan : Baik = < 6% Sedang = 6 - < 11% Rusak ringan = 11 - < 15% Rusak berat = > 15% • Kondisi mantap adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang rata, tidak bergelombang atau mengalami rusak parah dengan persentase kerusakan < 6 - < 11% • Rumus yang digunakan untuk mendapatkan persentase diatas adalah sebagai berikut : Proporsi (%) = Panjang Jalan Baik dan Sedang / Panjang Jalan Total x 100% • Berdasarkan SK Bupati No. 100.3.3.2/266/415.10.1.3/2025 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan yang merupakan kewenangan Dinas PUPR sepanjang 807,823 km. • Penanganan Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan yang dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kondisi jalan dari Rusak Ringan dan Rusak Berat menjadi Baik. • Sedangkan Pemeliharaan Rutin dilaksanakan untuk mempertahankan dalam kondisi Sedang. • Sehingga pada akhir tahun 2025, target panjang ruas jalan Kabupaten dalam kondisi Baik dan Sedang menjadi 607,644 km dari 807,823 km atau sebesar 75,22% dapat tercapai. Proporsi (%) = 607,644 / 807,823 x 100% = 75,22%</p>

Atasan Langsung

 BAYU PANCOROADI
 NIP. 197412092003121002

Jombang, 10 Februari 2026
 Kepala Bidang Bina Marga

 AGUNG SETIAJI
 NIP. 198008012003121004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG**

Nama : AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO

NIP : 197501032006041017

Jabatan : KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Tugas Pokok : a. Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang serta Pertanahan
b. Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya

Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan
c. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan
d. Pengkoordinasian dan Fasilitasi Kerjasama di Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan
e. Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan
f. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Tata Ruang
g. Pelaksanaan Penatausahaan, Fasilitasi Pemanfaatan, dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
h. Pelaksanaan Updating data/Pendataan tanah Milik Pemerintah Daerah
i. Pelaksanaan Fungsi lain yang Diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Tertaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	<p>Target Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 79,52%.</p> <p>Dalam mengukur kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Jombang, digunakan pendekatan indeks penyelenggaraan penataan ruang yang dihitung dari 4 aspek yaitu perencanaan, pembinaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Perencanaan tata ruang merupakan pengawasan terhadap ketersediaan dokumen rencana tata ruang, yang diukur dari jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang telah disusun dalam 1 tahun. b. Pembinaan penataan ruang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan/atau penyusunan bentuk-bentuk pembinaan penataan ruang, yang diukur dari jumlah kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi peraturan dan pedoman bidang penataan ruang, pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan dalam 1 tahun. c. Pemanfaatan Ruang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, yang diukur dari jumlah penerbitan KKPR, jumlah dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan ruang jangka menengah dan jangka pendek yang disusun. d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan pengawasan terhadap penerapan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, yang diukur dari ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK serta ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam 1 tahun.</p>	<p>(25% persentase penilaian perencanaan tata ruang +25% persentase penilaian pembinaan tata ruang+ 25% persentase pemanfaatan ruang + 25% persentase penilaian pengendalian pemanfaatan ruang) dikali 100. a. Persentase penilaian perencanaan tata ruang dihitung dari jumlah penilaian (dalam angka prosentase) aspek perencanaan tata ruang dikalikan bobotnya. b. Persentase penilaian pembinaan tata ruang dihitung dari jumlah penilaian (dalam angka prosentase) aspek pembinaan tata ruang dikalikan bobotnya. c. Persentase penilaian pemanfaatan ruang dihitung dari jumlah penilaian (dalam angka prosentase) aspek pemanfaatan ruang dikalikan bobotnya. d. Persentase penilaian pengendalian pemanfaatan ruang dihitung dari jumlah penilaian (dalam angka prosentase) aspek pengendalian pemanfaatan ruang dikalikan bobotnya. Dari keempat aspek di atas akan dihitung menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan dan akan menghasilkan indeks penyelenggaraan penataan ruang yang selanjutnya dapat diketahui predikat kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam 3 kategori berikut: - predikat kinerja baik : >/80 - predikat kinerja sedang <80 - predikat kinerja buruk : <50 Sumber: Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2021</p>	<p>Laporan hasil rekomendasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang untuk pembangunan daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 dengan rincian data sebagai berikut: - Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang - Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p>

No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
2	Terselesainya Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindaklanjuti	Fasilitasi pengaduan kasus pertanahan merupakan proses atau upaya yang dilakukan untuk membantu menyampaikan, menangani, dan mencari solusi atas pengaduan kasus pertanahan yang masuk. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur ketercapaian program ini yaitu: - Jumlah fasilitasi pengaduan kasus pertanahan adalah jumlah fasilitasi pengaduan kasus pertanahan yang diberikan dalam 1 (satu) tahun - Jumlah pengaduan kasus pertanahan adalah jumlah pengaduan kasus pertanahan yang masuk dalam 1 (satu) tahun	Jumlah fasilitasi pengaduan kasus pertanahan / Jumlah pengaduan kasus pertanahan x 100%	Data Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti
3	Tervalidasinya Bidang Tanah Yang Menjadi Data Spasial	Persentase dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang disusun	Target dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang disusun sebesar 50%. Dokumen informasi spasial penggunaan tanah merupakan Informasi penatagunaan tanah mencakup seluruh aspek yang terkait dengan bagaimana tanah dimanfaatkan, direncanakan, dan diarahkan penggunaannya, agar sesuai dengan rencana tata ruang, kebutuhan pembangunan, dan kepentingan publik. - Jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang tersusun adalah jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang disusun dalam 1 (satu) tahun - Total jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah adalah jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah di Kabupaten Jombang yang meliputi dokumen pendataan aset dan pemutakhiran pendataan aset pada seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang sehingga terdapat 21 dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang harus dilakukan pendataan dan dilanjutkan dengan kegiatan pemutakhiran. Kegiatan pendataan aset pada 21 kecamatan telah tercapai 100% selama Tahun 2018 s.d. 2025. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemutakhiran data aset yang direncanakan terlaksana pada periode 2025 s.d. 2030	Jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang tersusun/ Total jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang ditargetkan dikali 100%	Data bidang tanah yang terinventarisasi secara spasial

Atasan Langsung

BAYU PANCORADI
NIP. 197412092003121002

Jombang, 19 Februari 2026
Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan

AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO
NIP. 197501032006041017

**KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG**

Nama : **AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO**

NIP : **197501032006041017**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Tugas Pokok : **a. Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang serta Pertanahan**
b. Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya

Fungsi : **a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan**
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan
c. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan
d. Pengkoordinasian dan Fasilitasi Kerjasama di Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan
e. Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dan Pertanahan
f. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Tata Ruang
g. Pelaksanaan Penatausahaan, Fasilitasi Pemanfaatan, dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
h. Pelaksanaan Updating data/Pendataan tanah Milik Pemerintah Daerah
i. Pelaksanaan Fungsi lain yang Diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
1	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		77,19	79,52	%	<p>{25% persentase penilaian perencanaan tata ruang +25% persentase penilaian pembinaan tata ruang+ 25% persentase pemanfaatan ruang + 25% persentase penilaian pengendalian pemanfaatan ruang) dikali 100. Penetapan target kinerja untuk program penyelenggaraan penataan ruang adalah nilai indeks penyelenggaraan penataan ruang sebesar 79,52%, yang dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1. Dari sisi faktor internal, penyesuaian ini mempertimbangkan target kinerja sebelumnya bahwa presentase kesesuaian pemanfaatan ruang belum mengakomodir seluruh aspek kinerja penyelenggaraan penataan ruang, sehingga perlu penyesuaian indikator agar dapat merepresentasikan dukungan terhadap keterwujudan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Penyesuaian penetapan target mengacu pada hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten/Kota Tahun 2024 oleh Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Jombang mendapat predikat baik dengan indeks penyelenggaraan penataan ruang 50 s.d 80. 2. Dari sisi faktor eksternal, penyesuaian ini juga merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021 bahwa indeks penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan ruang secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan aspek Perencanaan Tata Ruang, Pembinaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p>
2	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindaklanjuti	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100	100	100	%	<p>Jumlah fasilitasi pengaduan kasus pertanahan / Jumlah pengaduan kasus pertanahan x 100%. Adapun analisis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian program ini yaitu: - Jumlah fasilitasi pengaduan kasus pertanahan adalah jumlah fasilitasi pengaduan kasus pertanahan yang diberikan dalam 1 (satu) tahun - Jumlah pengaduan kasus pertanahan adalah jumlah pengaduan kasus pertanahan yang masuk dalam 1 (satu) tahun</p>

No	Indikator Kinerja Utama/ Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Satuan	Analisi/Dasar Penetapan
3	Persentase dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang disusun	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		47,62	50	%	Jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang tersusun/ Total jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang ditargetkan dikali 100%. Total jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah adalah jumlah dokumen informasi spasial penggunaan tanah di Kabupaten Jombang yang meliputi dokumen pendataan aset dan pemutakhiran pendataan aset pada seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang sehingga terdapat 21 dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang harus dilakukan pendataan dan dilanjutkan dengan kegiatan pemutakhiran. Kegiatan pendataan aset pada 21 kecamatan telah tercapai 100% selama Tahun 2018 s.d. 2025. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemutakhiran data aset yang direncanakan terlaksana pada periode 2025 s.d. 2030

Atasan Langsung

BAYU PANCORADI
NIP. 197412092003121002

Jombang, 19 Februari 2026
Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan

AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO
NIP. 197501032006041017

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAL 4

Nama : AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO
 NIP : 197501032006041017
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina / IV/a
 Jabatan : KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
 Unit Kerja : Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	79,52 %	100 %	110%	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 3.944.564.050,00	Rp 3.881.360.643,50	98,40%	<p>Realisasi indeks penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik sebesar 88,36% melebihi target sebesar 79,52%. Realisasi didapatkan dari hasil kinerja aspek perencanaan tata ruang, pembinaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Aspek perencanaan tata ruang telah terlaksananya penyusunan materi teknis sebanyak 6 RDTR, 5 RDTR telah berproses persetujuan substansi, dan 1 RDTR telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Aspek pembinaan tata ruang telah terlaksana melalui penyelenggaraan konsultasi publik RDTR, pelatihan pemetaan drone dasar dan pengolahan 3D model kawasan, bimtek kebijakan pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025, Sosialisasi Perbur Nomor 53 Tahun 2024 tentang RDTR WP Mojowarno Tahun 2024-2044. Aspek pemanfaatan ruang telah terlaksana fasilitasi persetujuan KKPR dengan 139 permohonan yang telah ditindaklanjuti dengan rincian sebanyak 103 kegiatan berusaha dan 36 kegiatan non berusaha, serta telah tersusunnya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek tahun 2025. Sedangkan dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR dan Penyataan Mandiri Pelaku UMK. Kendala yang masih dihadapi yaitu kurangnya SDM untuk melaksanakan monitoring rekomendasi pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan, sehingga perlu diperbanyak bimbingan teknis dan pelatihan. Selain itu, tidak ada RDTR yang menjadi target bimtek karena terjadi penurunan target di Kementerian ATR/BPN sejalan dengan efisiensi anggaran, sehingga klinik/asistensi dilakukan secara mandiri melalui daring.</p> <p>- Peningkatan kapasitas dan optimalisasi SDM, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat, optimalisasi penggunaan anggaran, serta penyesuaian cepat terhadap perubahan regulasi. - Melaksanakan klinik dan asistensi penyusunan RDTR secara mandiri melalui koordinasi daring dengan Kementerian ATR/BPN untuk menjaga keberlanjutan proses penyusunan RDTR</p>

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (%)
2	Terselesainya Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindaklanjuti	100 %	100 %	100.00%	2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 157.139.750,00	Rp 138.850.027,00	88.36%	<p>Realisasi program penyelesaian sengketa tanah garapan pada tahun 2025 sebesar 100% dengan rincian telah tersusunnya 1 dokumen laporan fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan dibagi target sebanyak 1 laporan. Kegiatan yang telah terlaksana pada tahun ini yaitu fasilitasi Perselebaran Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam rangka mendukung pembangunan dan peningkatan ruas jalan Kedungdendeng-Jipurapah, yang dibuktikan dengan tersampainya permohonan rekomendasi PPKH kepada Gubernur melalui sistem JOSS. Selanjutnya, telah dilaksanakan kegiatan pensertipikatan aset tanah milik Pemerintah Daerah berupa aset tanah bawah jalan sebanyak 16 ruas jalan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang sebagai upaya pengamanan dan pemberian administrasi aset daerah. Untuk pekerjaan jasa konsultasi, telah dilakukan pemeriksaan substansi terhadap hasil pekerjaan Kajian Penyelesaian Sengketa Aset Tanah Bawah Jalan di Kawasan Hutan, dengan hasil bahwa kelengkapan substansi pekerjaan secara umum telah terpenuhi. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada aspek ketajaman analisis, kejelasan rekomendasi, serta konsistensi data pendukung agar hasil kajian dapat digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa.</p>	- Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka mendukung proses permohonan rekomendasi PPKH dari Gubernur melalui jatin OSS - Mengkoordinasikan kepada tim internal dan pihak terkait dalam rangka pemanfaatan hasil pekerjaan jasa konsultasi
3	Tervalidasinya Bidang Tanah Yang Menjadi Data Spasial	Persentase dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang disusun	50 %	75 %	110%	3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 153.580.000,00	Rp 152.467.186,00	99.28%	<p>Realisasi program penatagunaan tanah pada tahun 2025 sebesar 50% dengan rincian telah terlaksananya pendataan aset tanah yang divalidasi secara spasial sebanyak 21 kegiatan dibagi dengan target sebanyak 41 kegiatan. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik bahwa pada tahun 2025 kegiatan pendataan aset tanah secara spasial telah tuntas dilakukan pada 21 kecamatan sehingga masih terdapat target 21 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2025, telah terlaksana kegiatan pendataan aset tanah milik pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai rencana, dengan hasil berupa pendataan dan validasi secara spasial terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan Sumobito. Berdasarkan hasil kegiatan, telah terdapat sebanyak 40 titik aset yang tersebar pada 21 desa di Kecamatan Sumobito.</p>	*. Menindaklanjuti hasil pendataan dengan proses pensertipikatan terhadap aset tanah yang belum memiliki legalitas hukum, sebagai upaya pengamanan aset daerah dari potensi sengketa atau klaim pihak lain. - Mengoptimalkan pemanfaatan data spasial aset tanah sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, penataan ruang, serta pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
Rata-rata capaian					106.67%							

Atasan Langsung

BAYU PANCOROADI
 NIP. 197412092003121002

Jombang, 04 Februari 2026
 Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan

AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO
 NIP. 197501032006041017

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Tahun 2025 (Tahunan)

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO, ST.MT.	1	NAMA	BAYU PANCOROADI, ST, MT
2	NIP	197501032006041017	2	NIP	197412092003121002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN	4	JABATAN	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	UNIT KERJA	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	5	UNIT KERJA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAIK

POLA DISTRIBUSI:

KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK



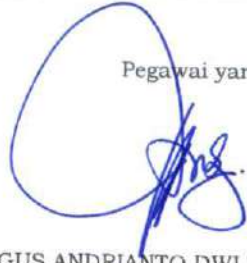
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang Indikator : Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Kuantitas	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	79,52%	88,36% berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pimpinan: Realisasi kinerja melebihi target yang telah ditentukan 📌
2	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang Indikator : Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	Terselesaikannya Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan	Kuantitas	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindaklanjuti	100 %	100% berdasarkan Dokumen Penyelesaian permasalahan pertanahan	Pimpinan: Sesuai ekspektasi, realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan 📌
3	Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang Indikator : Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%	Tervalidasinya Bidang Tanah Yang Menjadi Data Spasial	Kuantitas	Persentase dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang disusun	50 %	50% berdasarkan Laporan Informasi Spasial Penggunaan Tanah	Pimpinan: Sesuai ekspektasi, realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan 📌
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
1	Berorientasi Pelayanan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model bagi pegawai lain dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku			Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌	
2	Akuntabel						

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawab dengan penuh rasa tanggungjawab</p> <p>Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan rencana hasil kinerja sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan</p> <p>Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model untuk pegawai lainnya dalam upaya menciptakan lingkungan kerja kondusif</p> <p>Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model untuk pegawai lain dalam hal loyalitas sebagai pegawai negeri sipil</p> <p>Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Beradaptasi dengan baik dalam menghadapi perubahan atau tantangan baru</p> <p>Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bekerja sama, memanfaatkan berbagai sumberdaya , dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait</p> <p>Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌</p>

RATING PERILAKU KERJA
DIATAS EKSPEKTASI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
BAIK

Pegawai yang Dinilai



AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO, ST.MT.
197501032006041017

Jombang, 9 Januari 2026
Pejabat Penilai Kinerja



BAYU PANCOROADI, ST, MT
197412092003121002



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : TAHUN 2025 (TAHUNAN)

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO, ST.MT.
	NIP	: 197501032006041017
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina / IV/a
	JABATAN	: KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
	UNIT KERJA	: Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: BAYU PANCOROADI, ST, MT
	NIP	: 197412092003121002
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Tingkat I / IV/b
	JABATAN	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	UNIT KERJA	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: WARSUBI
	NIP	:
	PANGKAT/GOL RUANG	:
	JABATAN	: Bupati
	UNIT KERJA	: Pemerintah Kabupaten Jombang
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI	

Jombang, 9 Januari 2026
7. Pegawai yang Dinilai

AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO, ST.MT.
197501032006041017

Jombang, 9 Januari 2026
6. Pejabat Penilai Kinerja

BAYU PANCOROADI, ST, MT
197412092003121002

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNAL 4

Nama : AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO
NIP : 197501032006041017
Pangkat/Gol Ruang : Pembina / IV/a
Jabatan : KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Unit Kerja : Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	- Indeks penyelenggaraan penataan ruang	Merumuskan hasil pembahasan konsep rancangan Rencana Detail Tata Ruang	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%	Target telah tercapai dengan dilaksanakannya perumusan konsep rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 6 RDTR. Berdasarkan hasil perumusan konsep rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dapat disimpulkan bahwa konsep rancangan telah disusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang serta berdasarkan masukan dari stakeholder terkait. Hasil perumusan ini menjadi dasar konseptual yang penting dalam penyusunan dokumen RDTR secara lebih rinci dan komprehensif.	Mengkoordinasikan dengan tim untuk menyiapkan dokumen RDTR untuk tahapan evaluasi dan/atau Peretujuan Substansi sesuai ketentuan yang berlaku.	
	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	- Indeks penyelenggaraan penataan ruang	Menindaklanjuti layanan Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang sesuai prosedur melalui sistem informasi penataan ruang	100 %	100 %	100.00%	Target kinerja telah tercapai dimana nilai didapat dari jumlah permohonan yang ditindaklanjuti. Seluruh permohonan telah ditindaklanjuti dengan telah terusun draft Berita Acara Persetujuan KKPR terhadap 45 permohonan KKPR pada Tribunal IV. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon telah mengikuti ketentuan yang berlaku, dan instansi telah melakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTR yang berlaku, melalui penyediaan informasi rencana tata ruang yang dapat diakses mandiri oleh masyarakat untuk mengetahui kesesuaian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rencana tata ruang melalui sistem informasi yang telah disediakan K/L terkait maupun Layanan Tata Ruang pada Dinas PUPR. Adapun yang menjadi kendala dalam pencapaian target adalah dimana belum seluruh pelaku kegiatan memahami prosedur KKPR dan ketentuan pemanfaatan ruang serta adanya perubahan mekanisme PKKPR pasca terbitnya PP 28 Tahun 2025 yang berdampak pada performa sistem OSS yang sering dilakukan pemeliharaan dan proses penyesuaian pemohon/pelaku usaha dan petugas layanan terhadap fitur baru pada sistem OSS	Melaksanakan koordinasi dengan DPM PTSP, Kantah, dan Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan kendala dan penyesuaian proses fasilitasi, peningkatan pemahaman petugas layanan terhadap mekanisme PKKPR pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025, serta pendampingan kepada pemohon/pelaku usaha dalam proses penyesuaian penggunaan fitur baru pada sistem OSS.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	- Indeks penyelenggaraan penataan ruang	Merumuskan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen kajian dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	Target kinerja telah tercapai dengan telah tersusunnya dokumen Pengendalian Implikasi Kewilayahan Kabupaten Jombang sesuai dengan ketentuan KAK dan petunjuk teknis No: 4/JUKNIS-700 PR.01.01/XI/2023 tentang penilaian perwujudan RTR dan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada penguatan keterkaitan dengan penilaian perwujudan rencana struktur dan pola ruang	Melakukan koordinasi dengan tim penyusun dalam rangka penyempurnaan dokumen. Hasil kajian Pengendalian Implikasi Kewilayahan Kabupaten Jombang dan kegiatan monev ini selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang dan dasar pertimbangan dalam rencana revisi RTRW Kabupaten Jombang	
	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	- Indeks penyelenggaraan penataan ruang	Merumuskan konsep pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	Target kinerja telah tercapai dengan dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman di bidang Tata Ruang. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang RDTR WP Mojowarno Tahun 2024-20244 telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Secara umum, pemahaman internal terhadap substansi peraturan dinilai cukup baik, khususnya di lingkungan Bidang Penataan Ruang. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas sosialisasi terutama dalam penyusunan materi agar lebih aplikatif, selain itu juga diperlukan koordinasi berkelanjutan antar unsur pelaksana agar pelaksanaan kebijakan penataan ruang dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak internal sebagai masukan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.	
	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	- Indeks penyelenggaraan penataan ruang	Merumuskan konsep rancangan dokumen penetapan rencana tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00%	Target kinerja telah tercapai dengan dilaksanakannya perumusan rancangan dokumen penetapan RDTR. Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, rancangan dokumen RDTR telah dirumuskan dan disempurnakan sesuai hasil pendampingan Persetujuan Substansi RDTR dan siap untuk digunakan pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.	Melakukan komunikasi aktif dengan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum proses pengajuan resmi.	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
2	Terselesaikannya Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan	- Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindaklanjuti	Merumuskan rekomendasi pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	<p>Target kinerja telah tercapai dengan terlaksananya: 1. Fasilitasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan untuk mendukung penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang dalam hal ini bertujuan untuk pembangunan/peningkatan ruas jalan Kedungdendeng-Jipurapah, dengan telah tersampainya permohonan rekomendasi PPKH ke Gubernur melalui website JOSS 2. Pensertipikatan aset tanah milik pemda meliputi aset tanah bawah jalan sebanyak 16 ruas jalan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang 3. Kegiatan pemeriksaan substansi pekerjaan jasa konsultansi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan hasil bahwa secara umum, kelengkapan substansi pekerjaan Kajian Penyelesaian Sengketa Aset Tanah Bawah Jalan di Kawasan Hutan telah terpenuhi. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada aspek ketajaman analisis, kejelasan rekomendasi, serta konsistensi data pendukung agar hasil kajian dapat digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa</p>	- Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka mendukung proses permohonan rekomendasi PPKH dari Gubernur melalui Jatim OSS - Mengkoordinasikan kepada tim internal dan pihak terkait dalam rangka pemanfaatan hasil pekerjaan jasa konsultansi	
Rata-rata capaian					100.00%				

Atasan Langsung

 BAYU PANCOROADI
 NIP. 197412092003121002

Jombang, 18 Februari 2026
 Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan

 AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO
 NIP. 197501032006041017

RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG

Nama : AGUS ANDRIANTO DWI WICAKSONO
NIP : 197501032006041017
Pangkat/Gol Ruang : Pembina / IV/a
Jabatan : KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Unit Kerja : Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Rencana Hasil Kerja :

Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang

Indikator :

1. Indeks penyelenggaraan penataan ruang

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Merumuskan hasil pembahasan konsep rancangan Rencana Detail Tata Ruang

Target : 6 Dokumen

2. Menindaklanjuti layanan Pemanfaatan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang sesuai prosedur melalui sistem informasi penataan ruang

Target : 100 %

3. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen kajian dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang

Target : 2 Laporan

4. Merumuskan konsep pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang

Target : 1 Laporan

5. Merumuskan konsep rancangan dokumen penetapan rencana tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku

Target : 5 Dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Terselesaikannya Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan

Indikator :

1. Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindaklanjuti

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

Tribulan 3 :

Renaksi

-

Tribulan 4 :

Renaksi

1. Merumuskan rekomendasi pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan

Target : 1 Dokumen

Rencana Hasil Kerja :

Tervalidasinya Bidang Tanah Yang Menjadi Data Spasial

Indikator :

1. Persentase dokumen informasi spasial penggunaan tanah yang disusun

Tribulan 1 :

Renaksi

-

Tribulan 2 :

Renaksi

-

**Tribulan 3 :
Renaksi**

-

**Tribulan 4 :
Renaksi**

-
